

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani masalah terkait kasus Prostitusi Gay yang praktiknya semakin terlihat di Kabupaten Jember dengan berdasarkan ketentuan yang ada di Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani masalah prostitusi gay selama ini hanya terbatas pada upaya pencegahan HIV/AIDS. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara tegas dan khusus mengatur tata kelola, pencegahan, serta penanggulangan prostitusi gay di wilayahnya. Padahal, prostitusi gay termasuk kategori bencana non-alam yang berdampak serius, seperti timbulnya korban jiwa serta gangguan psikologis dan mental pada pelakunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan masalah tersebut.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Wewenang, Tanggung Jawab, Prostitusi, Gay.



ABSTRACT

This study aims to analyze the authority and responsibility of the Jember Regency Government in addressing issues related to gay prostitution, a practice that is increasingly prevalent in Jember Regency, based on the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, the researcher is interested in conducting this research. The researcher used a normative juridical research type with an approach method utilizing statutory regulations and conceptual. The results of this study indicate that the Jember Regency Government's responsibility in addressing gay prostitution has so far been limited to efforts to combat HIV/AIDS. To date, there is no Regional Regulation (Perda) or Regional Head Regulation (Perkada) that expressly and specifically regulates the management, prevention, and handling of gay prostitution in the region. In fact, gay prostitution is categorized as a non-natural disaster with serious impacts, such as loss of life and psychological and mental disorders in perpetrators. This condition indicates a regulatory vacuum that has the potential to hinder the effective handling of this problem.

Keywords: Regional Government, Authority, Responsibility, Prostitution, Gay.

